



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SALATIGA
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BUDI PRASETIYONO**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **413775**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **833.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 413 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 207 m2/144 m2 di KAB / KOTA KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah Seluas 346 m2 di KAB / KOTA KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 173.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **49.000.000**

1. MOTOR, HONDA ASTREA Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, HONDA NF 125 TR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
3. MOTOR, HONDA CB 150 CB 150 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
4. MOTOR, HONDA GL100 Tahun 1980, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **---****D. SURAT BERHARGA** Rp. **---****E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **81.247.511****F. HARTA LAINNYA** Rp. **---****Sub Total** Rp. **963.247.511****III. HUTANG** Rp. **245.047.140****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. **718.200.371**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.